

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Standar Kompetensi (SK)/ Kompetensi Dasar (KD) (Kemampuan Yang Diuji Yang Skornya Rendah =<60) SMA/MA Di Provinsi Riau

Standar Kompetensi (SK)/ Kompetensi Dasar (KD) (Kemampuan yang diuji yang skornya rendah =<60) SMA/MA Di Provinsi Riau adalah sebagai berikut (Lihat Lampiran L-1, Tabel L-1.1 sampai dengan Tabel L-1.46):

1. Kelompok Bidang Studi IPA Tahun 2009/2010

- 1) SK/KD Bahasa Indonesia Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket A sebanyak 14 SK/KD.
- 2) SK/KD Bahasa Indonesia Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket B sebanyak 5 SK/KD.
- 3) SK/KD Bahasa Inggris Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket B sebanyak 4 SK/KD.
- 4) SK/KD Matematika Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket A sebanyak 4 SK/KD.
- 5) SK/KD Matematika Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket B sebanyak 1 SK/KD.
- 6) SK/KD Fisika Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket A sebanyak 8 SK/KD.
- 7) SK/KD Fisika Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket B sebanyak 13 SK/KD.

- 8) SK/KD Kimia Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010
Paket A sebanyak 7 SK/KD.
- 9) SK/KD Kimia Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010
Paket B sebanyak 3 SK/KD.
- 10) SK/KD Biologi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010
Paket A sebanyak 2 SK/KD.
- 11) SK/KD Biologi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010
Paket B sebanyak 5 SK/KD.

2. Kelompok Bidang Studi IPA Tahun 2008/2009

- 1) SK/KD Bahasa Indonesia Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran
2008/2009 sebanyak 11 SK/KD.
- 2) SK/KD Bahasa Inggris Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran
2008/2009 sebanyak 6 SK/KD.
- 3) SK/KD Matematika Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran
2008/2009 sebanyak - SK/KD.
- 4) SK/KD Fisika Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2008/2009
sebanyak 3 SK/KD.
- 5) SK/KD Kimia Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2008/2009
sebanyak 3 SK/KD.
- 6) SK/KD Biologi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2008/2009
sebanyak 14 SK/KD.

3. Kelompok Bidang Studi IPA Tahun 2007/2008

- 1) SK/KD Bahasa Indonesia Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2007/2008 sebanyak 13 SK/KD.
- 2) SK/KD Bahasa Inggris Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2007/2008 sebanyak 12 SK/KD.
- 3) SK/KD Matematika Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2007/2008 sebanyak 10 SK/KD.
- 4) SK/KD Fisika Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2007/2008 sebanyak 5 SK/KD.
- 5) SK/KD Kimia Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2007/2008 sebanyak 7 SK/KD.
- 6) SK/KD Biologi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2007/2008 sebanyak 8 SK/KD.

4. Kelompok Bidang Studi IPS Tahun 2009/2010

- 1) SK/KD Bahasa Indonesia Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket A sebanyak 17 SK/KD.
- 2) SK/KD Bahasa Indonesia Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket B sebanyak 6 SK/KD.
- 3) SK/KD Bahasa Inggris Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket A sebanyak 3 SK/KD.
- 4) SK/KD Bahasa Inggris Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket B sebanyak 6 SK/KD.

- 5) SK/KD Matematika Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket A sebanyak 2 SK/KD.
- 6) SK/KD Matematika Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket B sebanyak 3 SK/KD.
- 7) SK/KD Ekonomi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket A sebanyak 9 SK/KD.
- 8) SK/KD Ekonomi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket B sebanyak 6 SK/KD.
- 9) SK/KD Sosiologi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket A sebanyak 19 SK/KD.
- 10) SK/KD Sosiologi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket B sebanyak 16 SK/KD.
- 11) SK/KD Geografi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket A sebanyak 16 SK/KD.
- 12) SK/KD Geografi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 Paket B sebanyak 16 SK/KD.

5. Kelompok Bidang Studi IPS Tahun 2008/2009

- 1) SK/KD Bahasa Indonesia Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2008/2009 sebanyak 19 SK/KD.
- 2) SK/KD Bahasa Inggris Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2008/2009 sebanyak 9 SK/KD.
- 3) SK/KD Matematika Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2008/2009 sebanyak 2 SK/KD.

- 4) SK/KD Ekonomi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2008/2009 sebanyak 6 SK/KD.
- 5) SK/KD Sosiologi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2008/2009 sebanyak 15 SK/KD.
- 6) SK/KD Geografi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2008/2009 sebanyak 5 SK/KD.

6. Kelompok Bidang Studi IPS Tahun 2007/2008

- 1) SK/KD Bahasa Indonesia Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2007/2008 sebanyak 16 SK/KD.
- 2) SK/KD Bahasa Inggris Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2007/2008 sebanyak 20 SK/KD.
- 3) SK/KD Matematika Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2007/2008 sebanyak 14 SK/KD.
- 4) SK/KD Ekonomi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2007/2008 sebanyak 7 SK/KD.
- 5) SK/KD Sosiologi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2007/2008 sebanyak 11 SK/KD.
- 6) SK/KD Geografi Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2007/2008 sebanyak 17 SK/KD.

4.2. Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Nilai Ujian Nasional Pada Mata Pelajaran Yang di-UN-kan di Provinsi Riau

Faktor penyebab rendahnya nilai UN mata pelajaran di analisis dengan mengacu pada standar pendidikan nasional yang dijabarkan dalam standar isi,

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Masing-masing standar dianalisis dari jawaban angket, hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada guru, siswa, dan manajemen sekolah di SMA di Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil perhitungan gambaran statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Gambaran statistik variabel komponen standar kompetensi

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Standar Isi	15	9.00	23.00	252.00	16.8000	3.32093
Standar Proses	15	14.00	29.00	321.00	21.4000	5.34255
Standar Kompetensi Lulusan	15	13.00	19.00	235.00	15.6667	1.91485
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15	16.00	37.00	399.00	26.6000	6.88477
Standar Sarana dan Prasarana	15	32.00	43.00	537.00	35.8000	3.05193
Standar Pengelolaan	15	20.00	37.00	436.00	29.0667	5.78751
Standar Pembiayaan	15	21.00	27.00	360.00	24.0000	1.51186
Standar Penilaian	15	32.00	39.00	543.00	36.2000	2.04241
Nilai Ujian Nasional	15	34.00	56.00	663.00	44.2000	7.81208
Valid N (listwise)	15					

Sumber: Data hasil penelitian, tahun 2011

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa gambaran statistik masing-masing variabel penelitian, yaitu: (1) Variabel Komponen Standar Isi menunjukkan bahwa skor minimum 9, skor maksimum 23, dan rata-rata skor 16,8; (2) Variabel Komponen Standar Proses menunjukkan bahwa skor minimum 14, skor maksimum 29, dan rata-rata skor 21,4; (3) Variabel Komponen Standar Kompetensi Lulusan menunjukkan bahwa skor minimum 13, skor maksimum

19, dan rata-rata skor 15,67; (4) Variabel Komponen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan menunjukkan bahwa skor minimum 16, skor maksimum 37, dan rata-rata skor 26,6; (5) Variabel Komponen Standar Sarana dan Prasarana menunjukkan bahwa skor minimum 32, skor maksimum 43, dan rata-rata skor 35,8; (6) Variabel Komponen Standar Pengelola Pendidikan menunjukkan bahwa skor minimum 20, skor maksimum 37, dan rata-rata skor 29,07; (7) Variabel Komponen Standar Pembiayaan Pendidikan menunjukkan bahwa skor minimum 21, skor maksimum 27, dan rata-rata skor 24; (8) Variabel Komponen Standar Penilaian Pendidikan menunjukkan bahwa skor minimum 32, skor maksimum 39, dan rata-rata skor 44,2. Masing-masing variabel menunjukkan posisi yang sedang karena skor yang diperoleh dalam kisaran pertengahan dari skor standar kompetensi yang maksimal. Ini bermakna bahwa SMA di Provinsi Riau yang digunakan dalam penelitian ini dalam posisi sedang (tidak terlalu baik dan juga tidak terlalu buruk) kalau diukur dengan delapan standar kompetensi pendidikan yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gambaran lebih terinci tentang peta standar kompetensi pendidikan pada sekolah menengah atas (SMA) di Provinsi Riau disajikan pada (Lampiran 2: Tabel L-2.1 sampai dengan Tabel L-2.131).

Tabel 4.2.
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.931 ^a	.867	.690	4.34770

a. Predictors: (Constant), Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Pembiayaan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 4.3.
ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	740.985	8	92.623	4.900	.034 ^a
	Residual	113.415	6	18.903		
	Total	854.400	14			

Tabel 4.2. dan Tabel 4.3. menunjukkan bahwa Variabel Nilai Ujian Nasional dapat diprediksi melalui Variabel Komponen Standar Isi, Variabel Komponen Standar Proses, Variabel Komponen Standar Kompetensi Lulusan, Variabel Komponen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Variabel Komponen Standar Sarana dan Prasarana, Variabel Komponen Standar Pengelola Pendidikan, Variabel Komponen Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Variabel Komponen Standar Penilaian Pendidikan.

Koefisien determinasi sebesar 0,867. Hal ini menunjukkan bahwa Kontribusi Variabel Independen terhadap Variabel Dependen sebesar 86,7% sedangkan sisanya (13,3%) ditentukan oleh variabel lain di luar model atau

dengan kata lain, variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 86,7%.

Untuk melihat hubungan variabel dependen dengan masing-masing variabel independen dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Hubungan Antara variabel delapan Komponen Standar dan Hasil Ujian Nasional

		Correlations								
		Standar Isi	Standar Proses	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar Sarana dan Prasarana	Standar Pengelolaan	Standar Pembiayaan	Standar Penilaian	Nilai Ujian Nasional
Standar Isi	Pearson Correlation	1	.170	.022	.224	.186	.313	.313	-.289	.271
	Sig. (2-tailed)		.545	.937	.422	.507	.256	.256	.297	.328
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Standar Proses	Pearson Correlation	.170	1	.244	.727**	-.039	.752**	.274	-.289	.806**
	Sig. (2-tailed)	.545		.380	.002	.892	.001	.323	.296	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Standar Kompetensi Lulusan	Pearson Correlation	.022	.244	1	.238	.232	.234	.074	.164	.258
	Sig. (2-tailed)	.937	.380		.392	.405	.401	.793	.558	.353
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pearson Correlation	.224	.727**	.238	1	.407	.938**	.432	-.106	.817**
	Sig. (2-tailed)	.422	.002	.392		.132	.000	.108	.708	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Standar Sarana dan Prasarana	Pearson Correlation	.186	-.039	.232	.407	1	.284	.402	-.085	-.019
	Sig. (2-tailed)	.507	.892	.405	.132		.305	.137	.764	.946
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Standar Pengelolaan	Pearson Correlation	.313	.752**	.234	.938**	.284	1	.400	-.068	.843**
	Sig. (2-tailed)	.256	.001	.401	.000	.305		.140	.811	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Standar Pembiayaan	Pearson Correlation	.313	.274	.074	.432	.402	.400	1	-.208	.357
	Sig. (2-tailed)	.256	.323	.793	.108	.137	.140		.457	.192
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Standar Penilaian	Pearson Correlation	-.289	-.289	.164	-.106	-.085	-.068	-.208	1	-.110
	Sig. (2-tailed)	.297	.296	.558	.708	.764	.811	.457		.696
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Nilai Ujian Nasional	Pearson Correlation	.271	.806**	.258	.817**	-.019	.843**	.357	-.110	1
	Sig. (2-tailed)	.328	.000	.353	.000	.946	.000	.192	.696	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa dari delapan variabel yang dihitung secara statistik menggunakan SPSS Versi 18 hubungannya dengan variabel hasil nilai Ujian Nasional ternyata hanya 3 (tiga) variabel saja yang hubungannya signifikan, yaitu:

- 1) Variabel Komponen Standar Proses: Terdapat korelasi positif signifikan antara Variabel Komponen Standar Proses dengan variabel Nilai Ujian Nasional. Koefesien korelasi antara Variabel Komponen Standar Proses dengan variabel Nilai Ujian Nasional sebesar 0,806.
- 2) Variabel Komponen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Terdapat korelasi positif signifikan antara Variabel Komponen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan variabel Nilai Ujian Nasional. Koefesien korelasi antara Variabel Komponen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan variabel Nilai Ujian Nasional sebesar 0,817.
- 3) Variabel Komponen Standar Pengelolaan: Terdapat korelasi positif signifikan antara Variabel Komponen Standar Pengelolaan dengan variabel Nilai Ujian Nasional. Koefesien korelasi antara Variabel Komponen Standar Pengelolaan dengan variabel Nilai Ujian Nasional sebesar 0,843.

Komponen 2: Standar Proses Pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel Nilai Ujian Nasional sebesar 0,806. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pembelajaran semua bidang studi tiap semester didukung oleh silabus. Akan tetapi silabus yang ada masih belum dimanfaatkan dalam pengembangan RPP oleh guru. Pelaksanaan pembelajaran belum mengacu sepenuhnya kepada RPP. Guru yang mengajar pada SMA yang mendapat nilai

UN tinggi sudah ada variasi pengembangan RPP bila dibandingkan dengan guru yang ada pada SMA yang Nilai UN rendah. Namun sayangnya baik guru yang mendapatkan nilai UN tinggi maupun rendah belum menganggap penting RPP sebagai dokumen yang berfungsi dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang bisa meningkatkan nilai UN sekolah.

Di samping itu, ada perbedaan pemantauan atas proses pembelajaran di SMA yang memperoleh UN tinggi dan rendah. Bagi SMA yang mendapat nilai UN tinggi, pemantauan dilakukan 2-4 kali pemantauan dan dilakukan diskusi dengan guru tetapi bagi SMA yang mendapat nilai UN rendah, pemantauan dilakukan hanya sekali dan tidak melakukan diskusi. Hal ini terjadi karena sekolah yang nilai UN rendah sekolah baru yang letaknya di pedesaan sehingga gurunya guru honorer dan minim pengalaman.

Implementasi tindak lanjut hasil supervisi baik SMA UN tinggi maupun SMA UN rendah sama-sama tidak ada tindak lanjutnya karena keterbatasan inovasi kepala sekolah dalam menggali dana-dana operasional sehingga tidak ada program inovasi dalam upaya peningkatan nilai UN terkecuali kegiatan insidental menjelang UN seperti tambahan jam pelajaran untuk membahas soal-soal UN tahun terdahulu.

Pendekatan pembelajaran di SMA UN tinggi maupun UN rendah masih terpusat pada pembelajaran behavioristik belum mengembangkan pembelajaran yang konstruktif. Hal ini terkait dengan belum biasanya guru dalam pembelajaran konstruktif yang membutuhkan kreativitas dari guru dalam membuat skenario pembelajaran. Model pembelajaran masih terpusat pada model ceramah yang

tidak menarik dan sangat jarang menggunakan *cooperative learning*. Media yang digunakan masih sangat terbatas pada media tradisional seperti papan tulis dan spidol saja.

Ada perbedaan yang sangat nyata antara SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan SMA yang mendapat nilai UN rendah. SMA yang mendapat nilai UN tinggi gurunya sudah memanfaatkan IT (*computer* dan *infocus*) dalam pembuatan media, tidak dilakukan bagi SMA yang mendapat UN rendah. Hal ini ada kaitannya dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Komponen 4: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel Nilai Ujian Nasional sebesar 0,817. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ada perbedaan kualifikasi akademik bagi SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan UN rendah. Kualifikasi Akademik SMA yang mendapat nilai UN tinggi rata-rata sudah berizazah S1/D4 bahkan ada beberapa guru yang sudah berizazah S2. Sementara kualifikasi akademik SMA yang mendapat nilai UN rendah rata-rata di bawah ijazah S1/D4. Hal ini terkait dengan akses untuk mendapatkan pendidikan, SMA yang mendapat nilai UN tinggi terletak di perkotaan sementara SMA yang mendapat nilai UN rendah ada di pedesaan yang jauh dari akses untuk melanjutkan pendidikan formal.

Di samping itu, ada perbedaan kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan bagi SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan UN rendah. Tingkat kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan SMA yang mendapat nilai UN tinggi rata-rata mendekati kesesuaian. Sementara tingkat kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan

latar belakang pendidikan SMA yang mendapat nilai UN rendah banyak yang tidak sesuai. Hal ini terkait dengan pemerataan penyebaran guru antara yang ada di kota dengan yang ada di desa. Di samping itu, kesenjangan ini juga diakibatkan oleh perilaku guru yang cenderung kalau sudah menjadi PNS bercita-cita dan ingin mutasi ke daerah kota.

Hal lain yang menyebabkan adanya hubungan adalah ada perbedaan penguasaan guru terhadap materi pelajaran serta pola pikir keilmuan pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan UN rendah. Penguasaan guru terhadap materi pelajaran serta pola pikir keilmuan SMA yang mendapat nilai UN tinggi rata-rata menguasai dengan baik. Sementara penguasaan guru terhadap materi pelajaran serta pola pikir keilmuan SMA yang mendapat nilai UN rendah rata-rata menguasai cukup baik.

Hal yang menggembarakan dari hasil penelitian ini ternyata tidak ada perbedaan tingkat kehadiran guru pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan UN rendah. Berdasarkan hasil wawancara tingkat kehadiran guru antara 80% sampai dengan 100%. Hal lain yang menggembarakan adalah tidak ada perbedaan tingkat integritas guru terkait kepribadian dan dan tindakan yang sesuai dengan norma-norma agaman, hukum, sosial, serta peraturan yang berlaku guru pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan UN rendah. Berdasarkan hasil wawancara tingkat integritas guru terkait kepribadian dan dan tindakan yang sesuai dengan norma-norma agama, hukum, sosial, serta peraturan yang berlaku selalu sesuai dengan ketentuan.

Komponen 6: Variabel Standar Pengelolaan Pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan dengan variabel Nilai Ujian Nasional sebesar 0,843. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ada perbedaan antara sekolah yang memperoleh UN tinggi dengan UN rendah dalam pengelolaan pendidikan. Hal-hal yang membedakan di antaranya, yaitu: 1). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi, Visi, misi, dan tujuan sekolah mudah dipahami dan disosialisasikan sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, Visi, misi, dan tujuan sekolah sulit dipahami serta tidak disosialisasikan; 2). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi, Sekolah merumuskan rencana kerja tahunan maupun yang berjangka menengah dan disosialisasikan sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, Sekolah merumuskan rencana kerja tahunan dan disosialisasikan, namun tidak merumuskan rencana kerja berjangka menengah; 3). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi, Terdapat struktur organisasi yang memperhatikan kejelasan tugas sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, tidak terdapat struktur organisasi yang memperhatikan kejelasan tugas; 4). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi, Sekolah merumuskan pedoman tertulis yang mengatur berbagai aspek pengelolaan sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, Sekolah tidak merumuskan pedoman tertulis yang mengatur berbagai aspek pengelolaan.

Di samping itu, perbedaan lain dalam hal program kerja dan sistem informasi manajemen, yaitu: 1). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi, Kegiatan sekolah sesuai dengan RKT sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, kegiatan sekolah sesuai dengan RKT; 2). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi,

Sekolah memiliki dan melaksanakan > 1 program pengelolaan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, Sekolah memiliki dan melaksanakan 1 program pengelolaan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran; 3). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi, Sekolah memiliki dan melaksanakan > 1 kegiatan yang dapat menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, Sekolah tidak memiliki kegiatan yang dapat menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif; dan 4). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi, Sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan baik sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, Sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan tidak baik.

Walaupun secara statistik hanya tiga komponen standar Pendidikan yang berkorelasi secara signifikan dengan nilai Ujian Nasional. Akan tetapi lima komponen lain pun perlu mendapatkan perhatian dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Riau. Temuan hasil penelitian yang berkaitan dengan Komponen 1: Standar Isi Pendidikan, yaitu: Semua guru dalam mata pelajaran telah menggunakan pembelajaran pada KTSP. Namun pada implementasi KTSP ada perbedaan, bagi sekolah yang memperoleh Nilai UN yang tinggi Guru melakukan pengembangan dalam penyusunan silabus maupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Akan tetapi sekolah yang Nilai UN rendah belum melakukan pengembangan baik silabus maupun RPP. Hal yang menarik berdasarkan data di lapangan baik sekolah yang mendapat nilai UN tinggi maupun

nilai UN rendah sama-sama memperlakukan Silabus dan RPP sebatas tugas dan kewajiban guru saja belum dijadikan sebagai tugas dan fungsi perencanaan pembelajaran. Bila fenomena ini ditanya lebih lanjut, ternyata faktor pengalaman mempengaruhi perilaku guru. Guru yang pengalaman mengajarnya tinggi akan melakukan pengembangan silabus maupun RPP tetapi yang belum berpengalaman silabus dan RPP nya relatif belum berkembang.

Temuan dalam penelitian yang berkaitan dengan komponen 3: Standar Kompetensi Lulusan, yaitu: 1). Ada perbedaan rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran di SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan SMA yang mendapat nilai UN rendah. Bagi SMA yang mendapat nilai UN tinggi, rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran di atas 80 sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah yaitu rata-rata nilai ketuntasan belajar di bawah 70; dan 2). Ada perbedaan pengalaman belajar melalui program pembiasaan mencari informasi lebih dari berbagai sumber belajar. Bagi SMA yang mendapat nilai UN tinggi, pengalaman belajar melalui program pembiasaan mencari informasi lebih dari berbagai sumber belajar seperti internet dan mengikuti bimbingan belajar baik oleh guru maupun lembaga di luar sekolah sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah hanya mendapatkan informasi dari sekolah.

Sementara itu, temuan yang berkaitan dengan komponen 5: Standar Sarana dan Prasarana, yaitu: 1). Ada perbedaan kesesuaian buku teks pelajaran sesuai dengan permendiknas pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan UN rendah. Kesesuaian buku teks pelajaran sesuai dengan permendiknas pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi rata-rata sudah sesuai. Sementara kesesuaian buku teks

pelajaran sesuai dengan permendiknas pada SMA yang mendapat nilai UN rendah rata-rata ada beberapa yang belum sesuai. Hal ini disebabkan karena terbatasnya buku teks yang disediakan oleh sekolah sedangkan pihak siswa pun tidak memenuhi keperluan buku yang diperlukan; dan 2). Ada perbedaan pemanfaatan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan UN rendah. Pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi rata-rata mata pelajaran memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan permendiknas, maupun buku teks yang lainnya. Sementara pada SMA yang mendapat nilai UN rendah rata-rata ada beberapa yang belum memanfaatkan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya buku teks yang disediakan oleh sekolah sedangkan pihak siswa pun tidak memenuhi kebutuhan buku yang diperlukan. Di samping itu, guru belum bisa mendorong siswa untuk memanfaatkan buku-buku teks.

Temuan yang berkaitan dengan komponen 8: Standar Penilaian, yaitu: 1). Tidak ada perbedaan baik SMA yang mendapat nilai UN tinggi maupun rendah, keduanya tidak terdapat informasi rancangan kriteria penilaian pada silabus disampaikan kepada para siswa di awal semester; 2). Terdapat perbedaan tingkat kesesuaian teknik penilaian pada silabus dengan indikator pencapaian KD antara SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan maupun UN rendah. Untuk SMA yang mendapat nilai UN tinggi, teknik penilaian pada silabus sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar. Sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah, teknik penilaian pada silabus kurang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar. Hal ini disebabkan oleh pemahaman guru dalam

mengembangkan perangkat perencanaan pembelajaran; 3) Terdapat perbedaan tingkat Kesesuaian instrumen dan pedoman penilaian dengan bentuk dan teknik penilaian antara SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan maupun UN rendah. Untuk SMA yang mendapat nilai UN tinggi, Instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian. Sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah, Instrumen dan pedoman penilaian kurang sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian. Hal ini disebabkan oleh kekurangmahiran guru dalam mengembangkan perangkat perencanaan pembelajaran khususnya teknik penilaian; 4). Terdapat perbedaan macam asesmen antara SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan maupun UN rendah. Untuk SMA yang mendapat nilai UN tinggi, Semua jenis asesmen tergolong asesmen autentik. Sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah, Sebagian jenis asesmen tergolong asesmen autentik dan sebagian lagi asesmen non autentik; 5). Terdapat perbedaan tentang balikan hasil kerja siswa disertai masukan/komentar yang mendidik pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan maupun UN rendah. Untuk SMA yang mendapat nilai UN tinggi, Guru selalu memberikan balikan hasil kerja siswa disertai masukan/komentar yang mendidik. Sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah, Guru sering memberikan balikan hasil kerja siswa disertai masukan/komentar yang mendidik; 6). Terdapat perbedaan tentang pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan maupun UN rendah. Untuk SMA yang mendapat nilai UN tinggi, Guru mata pelajaran selalu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah, Guru mata

pelajaran sering memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran; 7). Terdapat perbedaan tentang Pemantauan tingkat kelulusan UN pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan maupun UN rendah. Untuk SMA yang mendapat nilai UN tinggi, Selalu dilakukan pemantauan tingkat kelulusan UN. Sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah, Sering dilakukan pemantauan tingkat kelulusan UN; dan 8). Terdapat perbedaan tentang prestasi kelulusan UN sekolah dalam perbandingan dengan rata-rata kelulusan UN Nasional tahun terakhir pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan maupun UN rendah. Untuk SMA yang mendapat nilai UN tinggi, hasil mata pelajaran yang diujikan selalu lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata mata pelajaran nasional. Sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah, Hasil mata pelajaran yang diujikan, sering lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata mata pelajaran nasional.

4.3. Alternatif Pemecahan Masalah Dalam Upaya Peningkatkan Nilai Ujian Nasional Pada Mata Pelajaran Yang Di-UN-kan

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya peningkatan nilai ujian nasional di antaranya adalah:

1). Komponen 2: Standar Proses

- ❖ Agar silabus yang ada dimanfaatkan dalam pengembangan RPP oleh guru dan pelaksanaan pembelajaran mengacu sepenuhnya kepada RPP maka diperlukan perbaikan sistem supervisi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Sistem perbaikan supervisi yang dimaksud adalah penentuan target harian, mingguan, bulanan, dan semesteran harus ditentukan serta dimonitoring dan

evaluasi secara kontinyu. Bagi guru yang memenuhi target dan kinerjanya baik harus mendapatkan promosi, sebaliknya guru yang tidak memenuhi target dan kinerjanya kurang baik harus diberikan demosi. Ini penting untuk meningkatkan motivasi kerja para guru.

- ❖ Pemantauan atas proses pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap perolehan hasil UN. Oleh karenanya, guru berkewajiban untuk melakukan pemantauan minimal 4 kali pemantauan selama satu semester dan dilakukan diskusi dengan sesama guru baik tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten/kota untuk mengevaluasi hasil pemantauan prestasi siswa.
- ❖ Implementasi tindak lanjut hasil supervisi sangat penting untuk dilakukan. Kenyataan di lapangan hasil supervisi tidak ada tindak lanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas kepala sekolah dalam menggali dana operasional sehingga program peningkatan kualitas pendidikan SMA tidak terhambat.
- ❖ Agar pendekatan pembelajaran di SMA mengembangkan pembelajaran yang konstruktif maka diperlukan peningkatan kreativitas dari guru dalam membuat skenario pembelajaran yang konstruktif. Kemampuan dan kemahiran guru dalam mengembangkan pembelajaran yang konstruktif dijadikan salah satu indikator penilaian kinerja guru. Hal ini penting agar guru termotivasi dan dituntut untuk mengembangkan diri.
- ❖ Pemanfaatan IT (*computer dan infocus*) dalam pembuatan media oleh guru sangat membantu siswa dalam memahami materi. Kenyataan di lapangan terutama sekolah-sekolah yang perolehan nilai UN rendah sangat terbatas dalam pemanfaatan IT (*computer dan infocus*) dalam pembuatan media oleh

guru. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana terutama IT perlu perhatian yang serius oleh kepala sekolah dan komite sekolah.

2). Komponen 4: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- ❖ Kualifikasi Akademik bagi guru SMA berpengaruh terhadap perolehan nilai UN. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk membuat program percepatan agar semua guru SMA minimal S1/Diploma IV.
- ❖ Kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan bagi guru SMA berpengaruh terhadap perolehan nilai UN. Oleh karena itu, Tingkat kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan guru SMA perlu menjadi perhatian.
- ❖ Penguasaan guru terhadap materi pelajaran serta pola pikir keilmuan berpengaruh terhadap perolehan nilai UN. Oleh karena itu, Manajemen Sekolah dan Komite sekolah perlu punya program yang kontinyu untuk meningkatkan kapasitas guru dalam pemahaman materi . Salah satu program yang perlu dipertimbangkan di antaranya adalah pengikutsertakan pelatihan dan kegiatan ilmiah serta kegiatan MGMP perlu direvitalisasi.
- ❖ Guru harus mengembangkan model pembelajaran interaktif dan inovatif sehingga pembelajaran tidak membosankan. Diharapkan siswa bukan hanya memahami materi dari sisi kognitif tetapi siswa mampu memahami materi dari sisi afektif dan perilaku .

3). Komponen 6: Standar Pengelolaan Pendidikan

- ❖ Sekolah harus melakukan sosialisasi terhadap visi, misi, dan tujuan sekolah agar mudah dipahami oleh seluruh warga sekolah.

- ❖ Sekolah harus merumuskan rencana kerja tahunan maupun yang berjangka menengah dan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah.
- ❖ Sekolah harus membuat struktur organisasi yang memperhatikan kejelasan tugas masing-masing departemen dan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah.
- ❖ Sekolah harus merumuskan pedoman tertulis yang mengatur berbagai aspek pengelolaan.
- ❖ Kegiatan sekolah harus sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- ❖ Sekolah harus memiliki dan melaksanakan > 1 program pengelolaan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
- ❖ Sekolah harus memiliki dan melaksanakan > 1 kegiatan yang dapat menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
- ❖ Sekolah harus memiliki Sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan baik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau, di samping perbaikan terhadap tiga komponen yang berkorelasi dengan nilai ujian nasional yang telah dibahas, juga harus memperhatikan perbaikan berdasarkan temuan penelitian, di antaranya adalah:

1) Komponen 1: Standar Isi

- ❖ Agar implementasi KTSP pada mata pelajaran dapat dilaksanakan oleh guru khususnya dalam pengembangan penyusunan silabus maupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) maka diperlukan sistem penilaian kinerja guru berdasarkan prestasi. Kegiatan perencanaan pembelajaran dalam

mengembangkan silabus dan RPP harus diperhitungkan ke dalam beban kewajiban kerja guru (minimal 24 Jam pelajaran per minggu). Ini penting, mengingat selama ini pengembangan perencanaan merupakan kewajiban tetapi kompensasinya tidak diperhitungkan. Berbeda dengan PNS non guru, pekerjaan yang dikerjakan di luar jam dinas diperhitungkan dalam honor lembur.

2). Komponen 3: Standar Kompetensi Lulusan

- ❖ Program pembiasaan mencari informasi lebih dari berbagai sumber belajar seperti internet dan mengikuti bimbingan belajar baik oleh guru maupun lembaga di luar sekolah berpengaruh terhadap perolehan nilai UN SMA. Oleh karena itu, Kepala sekolah dan guru harus menciptakan kondisi yang kondusif agar para siswa mempunyai akses dalam mencari informasi lebih dari berbagai sumber belajar. Salah satu program yang bisa dipertimbangkan adalah guru memberikan tugas terstruktur dalam bentuk pekerjaan rumah pada setiap tatap muka.

3). Komponen 5: Standar Sarana dan Prasarana

- ❖ Kesesuaian dan pemanfaatan buku teks pelajaran sesuai dengan permendiknas pada SMA berpengaruh terhadap perolehan nilai UN. Oleh karena itu, Kepala sekolah dan Komite Sekolah perlu menyediakan buku teks pelajaran sesuai dengan permendiknas untuk setiap siswa.
- ❖ Laboratorium perlu dirintis dan diadakan agar siswa dapat memahami materi dari aspek afektif dan psikomotor.

4). Komponen 8: Standar Penilaian

- ❖ Guru harus menyampaikan dan menginformasi rancangan kriteria penilaian pada silabus kepada para siswa di awal semester. Hal ini penting agar para siswa mengetahui tujuan pembelajaran yang diikutinya.
- ❖ Guru harus mengupayakan kesesuaian teknik penilaian pada silabus dengan indikator pencapaian KD. Hal ini penting agar evaluasi yang dilakukan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- ❖ Guru harus mengupayakan Instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
- ❖ Guru harus mengupayakan semua jenis asesmen tergolong asesmen autentik.
- ❖ Guru harus selalu memberikan balikan hasil kerja siswa disertai masukan/komentar yang mendidik.
- ❖ Guru mata pelajaran harus selalu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- ❖ Guru mata pelajaran harus selalu melakukan pemantauan tingkat kelulusan UN.

4.4. Model Pemecahan Masalah Dalam Upaya Peningkatkan Nilai Ujian Nasional

4.4.1. Kebijakan

Perlu dilakukan reformasi kebijakan dalam penilaian kinerja guru terutama memasukan kegiatan perencanaan pembelajaran merupakan tugas pokok yang tak terpisahkan sehingga kegiatannya diperhitungkan dalam menentukan tugas minimal 24 jam per minggu.

4.4.2. Manajemen Sekolah

Dalam mengimplementasikan Sistem perbaikan supervisi kegiatan guru perlu dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan guru dan manajemen sekolah dalam bentuk model sekolah binaan dalam kegiatan perencanaan pembelajaran, model supervisi kegiatan guru, dan kemahiran penelitian tindakan kelas.

4.4.3. Guru Bidang Studi

Khusus untuk guru perlu dilakukan pemberdayaan dan pendampingan dalam bentuk model sekolah binaan dalam rangka peningkatan pemahaman materi yang perolehan nilai UN rendah.

4.4.5. Sarana dan Prasarana

- ❖ Kepala sekolah dan Komite Sekolah perlu menyediakan buku teks mata pelajaran sesuai dengan permendiknas untuk setiap siswa.
- ❖ Laboratorium setiap mata pelajaran perlu dirintis dan diadakan agar siswa dapat memahami materi bukan hanya pada aspek kognitif tetapi pada aspek afektif dan psikomotor.
- ❖ Kepala sekolah dan Komite Sekolah perlu menyediakan perangkat IT (*computer dan infocus*) dalam pembuatan media oleh guru.

4.4.6. Program Aksi dalam Model Pengembangan Sekolah Binaan

A. Pendahuluan

1. Rasionalisasi

Model Pengembangan Sekolah Binaan merupakan program kemitraan antara Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan Sekolah yang menjadi sasaran Pembinaan. Kemitraan yang dimaksud adalah upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah Kabupaten/Kota khususnya peningkatan nilai Ujian Nasional untuk semua mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional. Program kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan dan pemberdayaan yang terintegrasi dalam suatu sekolah dalam bentuk sekolah binaan.

2. Tujuan Model Sekolah Binaan

Model Pengembangan Sekolah Binaan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam suatu Kabupaten/Kota khususnya peningkatan nilai Ujian Nasional untuk semua mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional.

3. Sasaran Model Sekolah Binaan

Sasaran Model Sekolah Binaan adalah peningkatan 8 (delapan) Komponen Standar Kompetensi yaitu:

- 1) Komponen 1: Standar Isi Pendidikan.
- 2) Komponen 2: Standar Proses Pendidikan.
- 3) Komponen 3: Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan.
- 4) Komponen 4: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 5) Komponen 5: Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- 6) Komponen 6: Standar Pengelolaan Pendidikan.

7) Komponen 7: Standar Pembiayaan Pendidikan.

8) Komponen 8: Standar Penilaian Pendidikan.

4. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dengan Model Sekolah Binaan adalah:

1) Adanya perbaikan Komponen 1: Standar Isi Pendidikan.

2) Adanya perbaikan Komponen 2: Standar Proses Pendidikan.

3) Adanya perbaikan Komponen 3: Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan.

4) Adanya perbaikan Komponen 4: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

5) Adanya perbaikan Komponen 5: Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

6) Adanya perbaikan Komponen 6: Standar Pengelolaan Pendidikan.

7) Adanya perbaikan Komponen 7: Standar Pembiayaan Pendidikan.

8) Adanya perbaikan Komponen 8: Standar Penilaian Pendidikan.

5. Indikator Keberhasilan

1) Meningkatnya mutu pendidikan dilihat dari karakter siswa dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama.

2) Meningkatnya perolehan nilai Ujian Nasional dengan jujur dan sportif.

B. Mekanisme Pelaksanaan

1. Pelaksana Model Sekolah Binaan di Kabupaten/Kota

a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Pelaksana di Tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tugas:

1. Menetapkan panduan pelaksanaan program Model Sekolah Binaan dan panduan penyusunan Rencana Model Pengembangan Sekolah Binaan.
2. Menentukan Sekolah yang dijadikan Model Sekolah Binaan.
3. Melakukan verifikasi calon Model Sekolah Binaan.
4. Membuat Surat Keputusan (SK) penetapan Model Sekolah Binaan.
5. Melaksanakan sosialisasi Model Sekolah Binaan untuk sekolah percontohan (*Pilot Project*).
6. Memantau dan mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan program Model Sekolah Binaan.
7. Menyelesaikan/menindaklanjuti masalah/penyimpangan Model Sekolah Binaan

b. Kepala Sekolah yang ditetapkan sebagai Model Sekolah Binaan

Kepala Sekolah yang ditetapkan sebagai Model Sekolah Binaan merupakan Leading Sektor dari Program ini dengan tugas:

1. Mensosialisasikan program Model Sekolah Binaan.
2. Melakukan koordinasi fungsional dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebagai Konsultan Pendamping sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

3. Melakukan pembinaan pelaksanaan program Model Sekolah Binaan.
4. Memantau dan mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan program Model Sekolah Binaan.
5. Membuat laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan program Model Sekolah Binaan

c. Perguruan Tinggi Sebagai Konsultan Pendamping

Konsultan Pendamping program Model Sekolah Binaan dengan tugas:

1. Memberikan Pelatihan dan Workshop Program Model Sekolah Binaan.
2. Memberikan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan monitoring evaluasi dalam Program Model Sekolah Binaan.

2. Langkah-langkah Pelaksanaan Program Model Sekolah Binaan

Langkah-langkah pelaksanaan Program Model Sekolah Binaan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Penetapan sekolah Program Model Sekolah Binaan
2. Pelaksanaan sosialisasi Program Model Sekolah Binaan
3. Pembentukan Tim Pelaksana Program Model Sekolah Binaan di masing-masing Sekolah.
4. Melakukan Pelatihan, Workshop, dan Pendampingan Penyusunan Rencana Program Model Sekolah Binaan yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Sekolah Binaan.
5. Melakukan pendampingan oleh konsultan pendamping selama 2 tahun.

3. Pelaksanaan Program Model Sekolah Binaan

Pelaksanaan kegiatan di Sekolah dilaksanakan oleh tim pelaksana Sekolah dengan didampingi konsultan pendamping serta berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

- a. Kepala Sekolah menunjuk penanggungjawab satuan program untuk mencapai tujuan dari setiap satuan program. Penanggungjawab satuan program adalah unsur Wakil Kepala Sekolah yang bersangkutan yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan perhatian terhadap Model Sekolah Binaan.
- b. Penanggungjawab pelaksana satuan program non fisik membahas pelaksanaan pekerjaan, menyangkut target, kualitas pencapaian, dan anggaran dengan Kepala Sekolah didampingi Konsultan Pendamping dari Perguruan Tinggi.
- c. Penanggungjawan pelaksana satuan program fisik mengkoordinasikan semua sumberdaya manusia yang terlibat, pengadaan alat dan bahan yang diperlukan.
- d. Masing-masing penanggungjawab satuan program bersama-sama dengan Kepala Sekolah melaksanakan pekerjaan.
- e. Penanggungjawan satuan program bersama-sama dengan Kepala Sekolah melakukan pengawasan dan evaluasi Model Sekolah Binaan.
- f. Penanggungjawab satuan program membuat laporan, baik laporan kegiatan maupun laporan keuangan untuk disampaikan Kepala Sekolah.

4. Jadwal Pelaksanaan Program Model Sekolah Binaan

Untuk seluruh pelaksanaan program, penanggungjawab dari setiap satuan program bersama-sama dengan Kepala Sekolah membuat jadwal pelaksanaan program, baik program fisik maupun nonfisik. Jadwal yang dibuat mengacuk pada tahun Anggaran.

C. Supervisi Program Model Sekolah Binaan

Kepala Sekolah didampingi Konsultan Pendamping melakukan supervisi terhadap penanggungjawab satuan program berkaitan dengan pelaksanaan masing-masing program. Supervisi tersebut dilakukan secara berkala, dan hasil temuannya dibahas dalam forum rapat Tim Pelaksana Sekolah yang dilakukan secara berkala, minimal diadakan satu kali dalam satu bulan. Kemajuan pelaksanaan kegiatan Model Sekolah Binaan dilaporkan oleh tim pelaksana masing-masing satuan program dalam forum rapat. Laporan kemajuan ini dibuat 3 bulan sekali.

1. Pelaporan Kegiatan Program Model Sekolah Binaan

1. Jenis dan Tujuan Laporan

Setiap pelaksana satuan program diperlukan adanya laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim pelaksana Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota dan *stakeholder*. Laporan yang dimaksud meliputi laporan pelaksanaan program dan laporan keuangan. Laporan terdiri dari laporan kemajuan dan laporan akhir.

Laporan dibuat dengan tujuan untuk melihat sejauh mana tujuan telah dicapai dan mencermati kendala yang dihadapi oleh Model Sekolah Binaan selama pelaksanaan program-program dilaksanakan. Untuk menyusun laporan Tim pelaksana Sekolah didampingi oleh Konsultan Pendamping melakukan evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan setiap satuan program.

2. Mekanisme Pelaporan

- a. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dibuat 2 (dua) bulan setelah Program digulirkan dan selanjutnya dibuat secara berkala. Laporan akhir diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah program selesai.
- b. Setelah diperiksa oleh Tim Pelaksana Sekolah, laporan tersebut dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- c. Laporan pelaksanaan program dilampiri fotocopy bukti/dokumen yang relevan. Sedangkan laporan keuangan dikirim tanpa dilampiri bukti/dokumen, baik asli maupun foto copynya (bukti /dokumen pengeluaran keuangan disimpan di Sekolah dan akan diperiksa setiap saat oleh tim Monitoring dan Evaluasi dan Kabupaten atau petugas yang berwenang).

D. Monitoring dan Evaluasi

1. Tujuan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa Program Model Sekolah Binaan telah dilaksanakan dengan petunjuk pelaksanaan.

2. Sasaran dan Aspek yang dimonitor

Sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi adalah kegiatan Program Model Sekolah Binaan, Kegiatan Konsultan Pendamping, dan kegiatan di Kabupaten. Adapun aspek-aspek yang akan dimonitor mencakup:

1. Kegiatan Sosialisasi Program Model Sekolah Binaan.
2. Proses seleksi penentuan Program Model Sekolah Binaan .
3. Implementasi Program Model Sekolah Binaan.
4. Transparansi pelaksanaan program di Kabupaten dan Sekolah.
5. Pengaduan atas penyimpangan dana.
6. Kesesuaian antara Rencana Pengembangan Model Sekolah Binaan khususnya Rencana Operasional Model Sekolah Binaan dengan implementasinya.

3. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi adalah:

1. Untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai dengan yang direncanakan
2. Menemukan masalah-nasalah/hambatan dalam pelaksanaan Program Model Sekolah Binaan.

3. Memberikan rekomendasi cara penyelesaian masalah/hambatan.
4. Memeberikan masukan untuk perbaikan Program Model Sekolah Binaan.

4. Pelaksana

Pelaksanaan monitoring Program Model Sekolah Binaan terdiri dari Tim Kabupaten dan Tim Sekolah Binaan.

4.1. Tim Kabupaten

Tim monitoring tingkat Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan bertugas melakukan monitoring terhadap aktivitas sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program Model Sekolah Binaan.
2. Proses seleksi Sekolah yang menjadi Program Model Sekolah Binaan.
3. Pelaksanaan Program Model Sekolah Binaan.
4. Memonitoring kasus penyimpangan dana yang tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Sekolah.

4.2. Tim Sekolah

Kepala Sekolah melakukan monitoring terhadap kinerja TIM Sekolah dan laporan kemajuan Program Model Sekolah Binaan.

5. Jadwal Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sangat tergantung kepada kapan rangkaian kegiatan Program Model Sekolah Binaan dimulai. Oleh karena sasaran program ini adalah sekolah yang dijadikan percontohan (pilot project)

maka secara tepat kapan waktu monitoring harus dilakukan. Waktu pelaksanaan monitoring dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Monitoring Oleh Tim Kabupaten dilakukan pada saat:

- a. Kabupaten melakukan sosialisasi Program Model Sekolah Binaan.
- b. Kabupaten menyeleksi Sekolah penerima Program Model Sekolah Binaan.
- c. Implementasi program di Program Model Sekolah Binaan berjalan.
- d. Proses kerja konsultan pendamping Program Model Sekolah Binaan.
- e. Ada pengaduan tentang penyimpangan penggunaan dana dan Proses kerja konsultan pendamping Program Model Sekolah Binaan.

2. Monitoring Oleh Tim Sekolah pada saat:

- a. Implementasi program di tingkat Sekolah berjalan.
- b. Adanya pengaduan tentang penyimpangan penggunaan dana dan Proses kerja konsultan pendamping Program Model Sekolah Binaan.

6. Metode Monitoring dan Teknik Analisis Data

Metode monitoring dan teknik analisis data hasil monitoring dan evaluasi sangat tergantung kepada tingkatan dan jenis kegiatan yang dimonitor. Tabel di bawah ini menggambarkan secara singkat tentang metode monitoring. Adapun teknik analisis datanya pada umumnya dilakukan dengan analisis deskriptif (kuantitatif dan kualitatif).

Tabel 4.5.
Pelaksanaan Monitoring

Pelaksana Monitoring	Jadwal Kegiatan yang dimonitor	Metode Monitoring
Tim Kabupaten	Sosialisasi dan Pelatihan	Melalui pengamatan dan kuesioner ke seluruh peserta
	Seleksi Sekolah	Melalui pengamatan, wawancara, dan pemeriksaan dokumen di Dinas Pendidikan
	Penyaluran Dana	Kunjungan, wawancara dengan tim Sekolah
	Implementasi program	Kunjungan, wawancara, pengamatan di Sekolah dan pemeriksaan dokumen.
	Kerja Konsultan Pendamping	Kunjungan, wawancara, pengamatan di Sekolah dan pemeriksaan dokumen.
	Pengaduan penyimpangan dana	Kunjungan ke Sekolah yang bermasalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Sekolah

7. Evaluasi

Evaluasi merupakan aspek yang berbeda dengan monitoring. Monitoring terkait dengan kegiatan yang dilakukan untuk memantau atau mengawasi proses dan perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan; mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala atau masalah; dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Sedangkan evaluasi merupakan langkah mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi dan data dari suatu kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu program berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap program Model Pembinaan Sekolah Binaan yang dilakukan oleh masing-masing unsur terkait mencakup evaluasi terhadap persiapan (menyangkut konteks dan input), proses pelaksanaan, dan produk dari implementasi program Model Pembinaan Sekolah Binaan (menyangkut proses, *output*, dan *outcome*). Evaluasi persiapan dilakukan pada saat kegiatan belum dilaksanakan, evaluasi proses dilaksanakan pada saat pelaksanaan program, dan evaluasi produk implementasi program dilakukan pada saat program telah selesai dilakukan.

Hasil evaluasi suatu program dapat digunakan untuk menentukan apakah program sesuai dengan konteks dan input di mana program tersebut dilaksanakan, proses telah dilakukan dengan benar, serta produk yang dihasilkan program tersebut berhasil guna. Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat rekomendasi apakah program tersebut dapat dilanjutkan, dilanjutkan dengan perbaikan atau tidak dapat dilanjutkan.